Pembelajaran Dari Skema Pembayaran Jasa Lingkungan Eksisting Bagi Penyusunan Protokol Pembayaran Jasa Lingkungan Indonesia[1]

Zuzy Anna[2]

Abstrak

Paper ini merupakan hasil kajian kegiatan DANIDA-KLH melalui proyek ESP 2 tahun 2011 dan 2012 untuk instrumen ekonomi Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL). Dalam proses penyusunan protokol yang akan digunakan sebagai panduan bagi pelaksanaan PJL di Indonesia, dilakukan studi mengenai implementasi PJL di beberapa daerah seperti Cidanau, Lombok, Sungai Wain, Tahura dan Sumber Jaya lampung. Hasil analisis menunjukkan beberapa temuan gap antara konsep PJL dengan implementasinya di Indonesia. Gap tersebut diantaranya berkaitan dengan konsep definisi, aturan dan perundang-undangan, metode penilaian jasa lingkungan, kelembagaan, dan lain-lain. Dari kajian ini diperoleh beberapa pembelajaran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan ke depan best practices PJL di Indonesia. Pembelajaran dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu konseptual, komponen kunci dari pengembangan dan implementasi skema PJL di Indonesia dan analisis dampak.

Kata Kunci: Protokol, Implementasi PJL, Gap analysis, Pembelajaran, Komponen kunci PJL

Pendahuluan

Sebagai negara yang berbasiskan pada ekonomi sumber daya alam, Indonesia memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kekayaan sumber daya alamnya. Sumber daya alam merupakan tulang punggung bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi Indonesia. Bahkan dalam skema Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI), sangat nyata bahwa sumber daya alam menjadi modal dasar yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Namun demikian tentu saja tujuan utama percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di

[1] Paper ini merupakan pengembangan dari report lesson learn pada Project ESP2 KLH-DANIDA 2012.
[2] Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran Bandung, Tim Penyusun Protokol PJL, ESP2 KLH-Danida, 2011-2012.